

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-undang No.32 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah (Kawedar, 2008). Dengan adanya peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga pemerintah memberikan kualitas pelayanan publik yang baik.

Menurut Halim (2004: 67) pengertian Pendapatan Asli Daerah yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”.

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, pendapatan asli daerah adalah merupakan sumber penerimaan daerah baik provinsi maupun Kota/ Kabupaten. Pendapatan asli daerah menurut undang-undang No 33 tahun 2004 pasal 6 bersumber dari:

1) Pajak Daerah

Menurut Siagian, dalam bukunya yang berjudul Pajak Daerah Sebagai Keuangan Daerah, pajak daerah dapat didefinisikan sebagai pajak Negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomer 34 tahun 2000 pajak daerah didefinisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dalam desentralisasi fiskal, pungutan pajak daerah adalah tidak berarti memberikan sumber fiskal tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap daerah dan nasional, melainkan melalui penelaahan beberapa faktor dengan mengacu pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Maksimisasi Pendapatan Asli Daerah akan berimplikasi pada peningkatan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, karena penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah adalah dua komponen tersebut. Berdasarkan definisi pajak yang dijelaskan diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang ciri-ciri pajak yaitu:

- a) Pajak dipungut oleh negara (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) berdasarkan aturan undang-undang dan aturan pelaksanaan.
- b) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan kontra prestasi individu oleh pemerintah.

- c) Pajak diperuntukkan bagi pembayaran pengeluaran pemerintah yang mana jika dari pemasukannya masih terdapat surplus maka digunakan untuk investasi di sektor publik. Tujuan yang utama dari pemungutannya adalah sebagai sumber keuangan negara maupun sebagai sumber keuangan daerah.
- d) Pajak dipungut disebabkan keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

Jenis pajak propinsi ditetapkan sebagai empat jenis pajak, namun walaupun demikian propinsi boleh tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak di suatu daerah dipandang kurang memadai. Jenis pajak Kabupaten/Kota menurut Undang-undang No 34 Tahun 2000 yaitu:

- a) Pajak hotel, yaitu pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan oleh orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
- b) Pajak restoran, yaitu pajak atas pelayanan restoran.

- c) Pajak hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan, hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan keramaian yang ditonton atau dinikmati oleh banyak orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.
- d) Pajak reklame yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dimaksudkan untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum pada suatu barang, jasa atau dapat dilihat, dibaca, atau didengar oleh umum pada suatu tempat kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
- e) Pajak penerangan jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
- f) Pajak pengambilan bahan galian golongan c, yaitu pajak atas pengambilan bahan galian golongan c sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g) Pajak parkir, yaitu pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat

penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat (Rohmat Soemitro, dalam Adrian (2008: 55).

Menurut Rohmat Soemitro, dalam Adrian (2008: 74), mengatakan bahwa retribusi daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat sehingga keeluasaan retribusi daerah terletak pada yang dinikmati oleh masyarakat. Jadi, retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah daerah kepada yang membutuhkan.

Menurut Marihot P. Siahaan (2005: 6), "Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin

tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Munawir (1990: 45), menyebutkan definisi retribusi adalah sebagai berikut. “Retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk, paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah ia tidak akan dikenakan iuran tersebut”.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 ayat (16) Perda No. 5 Tahun 2011).

Sedangkan menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 yang dimaksud dengan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Ciri-ciri retribusi daerah sebagai berikut:

Dari pengertian retribusi daerah tersebut maka menurut Josef Riwo Kaho(1987: 43) dapat dilihat ciri-ciri mendasar dari retribusi daerah adalah :

- a. Retribusi dipungut oleh Pemerintah Daerah;
- b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan pemerintah daerah yang langsung dapat ditunjuk; dan
- c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau memakai jasa yang disediakan pemerintah daerah.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Salah satu penyebab diberlakukannya otonomi daerah adalah tingginya campur tangan pemerintah pusat dalam pengelolaan perekonomian pemerintahan daerah, termasuk didalamnya adalah pengelolaan kekayaan daerah berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sektor industri. Dengan adanya otonomi daerah, maka inilah saatnya bagi daerah untuk mengelola kekayaan daerahnya secara optimal guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, BUMD merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat dan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain laba deviden, dan penjualan saham milik daerah.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah adalah pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004 terdiri dari :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar terhadap mata uang asing
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2. Pariwisata

Menurut Ramdhani (2015), Pengembangan pariwisata berpengaruh positif pada perluasan peluang usaha dan kerja yang muncul karena adanya permintaan wisatawan yang berupa barang dan jasa. Untuk mengukur pengaruh pariwisata terhadap perekonomian suatu wilayah dapat dilakukan dilakukan melalui pendekatan pengeluaran pemerintah (*tourist expenditure*) dan pendekatan permintaan wisatawan (*tourist demand*) terhadap barang dan jasa. Pengeluaran wisata dapat berupa akomodasi, konsumsi makan, angkutan wisata atau jasa-jasa lainnya. Pariwisata sebagai suatu sistem yang mempunyai tatanan jaringan proses pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia,

budaya dan teknologi serta kegiatan yang saling mempengaruhi untuk menarik dan memfasilitasi wisatawan. Pengelolaan tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah, kalangan swasta maupun masyarakat. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari pengembangan industri pariwisata antara lain :

1) Membuka kesempatan kerja

Industri pariwisata merupakan kegiatan mata rantai yang sangat panjang sehingga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitarnya.

2) Menambah pendapatan masyarakat daerah

Di daerah pariwisata tersebut masyarakat dapat menambah pendapatan dengan menjual barang dan jasa.

3) Menambah devisa negara

Dengan semakin banyaknya wisatawan asing yang datang ke Indonesia, maka akan semakin banyak devisa yang diterima.

4) Merangsang pertumbuhan kebudayaan asli Indonesia

Kebudayaan yang sudah ada di Indonesia dapat tumbuh karena adanya pariwisata. Wisatawan asing banyak yang ingin melihat kebudayaan asli Indonesia.

5) Menunjang gerak pembangunan di daerah

Di daerah pariwisata banyak terlihat pembangunan jalan, hotel, restoran dan lain-lainnya sehingga pembangunan di daerah itu lebih maju.

a. Pengertian Pariwisata

Pariwisata adalah kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu,

memperbaiki kesehatan, menikmati olah raga atau istirahat, menunaikan tugas, berziarah, dan lain-lain, bukanlah merupakan kegiatan yang baru saja dilakukan oleh manusia masa kini. Menurut definisi yang luas pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu. Seseorang dapat melakukan perjalanan dengan berbagai cara karena alasan yang berbeda-beda pula. Suatu perjalanan dianggap sebagai perjalanan wisata bila memenuhi tiga persyaratan yang diperlukan, yaitu :

- a. Harus bersifat sementara
- b. Harus bersifat sukarela (voluntary) dalam arti tidak terjadi paksaan.
- c. Tidak bekerja yang sifatnya menghasilkan upah ataupun bayaran.

b. Jenis Pariwisata

Walaupun banyak jenis wisata ditentukan menurut motif tujuan perjalanan, menurut James J, Spillane (1987: 28-31) dapat juga dibedakan adanya beberapa jenis pariwisata khusus sebagai berikut :

a. Pariwisata Untuk Menikmati Perjalanan (Pleasure Tourism)

Pariwisata untuk menikmati perjalanan dilakukan untuk berlibur, mencari udara segar, memenuhi keingintahuan, mengendorkan ketegangan saraf, melihat sesuatu yang baru, menikmati keindahan alam, dan mendapatkan kedamaian.

b. Pariwisata Untuk Rekreasi (Recreation Tourism)

Pariwisata untuk rekreasi dilakukan sebagai pemanfaatan hari-hari libur untuk beristirahat, memulihkan kesegaran jasmani dan rohani dan menyegarkan keletihan.

c. Pariwisata Untuk Kebudayaan (Cultural Tourism)

Pariwisata untuk kebudayaan ditandai serangkaian motivasi seperti keinginan belajar di pusat riset, mempelajari adat-istiadat, mengunjungi monumen bersejarah dan peninggalan purbakala dan ikut festival seni musik.

d. Pariwisata Untuk Olah Raga (Sports Tourism)

Pariwisata untuk olahraga dibagi menjadi dua kategori, yakni pariwisata olahraga besar seperti Olimpiade, Asian Games, dan SEA Games serta buat mereka yang ingin berlatih atau mempraktikkan sendiri, seperti mendaki gunung, panjat tebing, berkuda, berburu, rafting, dan memancing.

e. Pariwisata Untuk Urusan Usaha Dagang (Business Tourism)

Pariwisata untuk urusan usaha dagang umumnya dilakukan para pengusaha atau industrialis antara lain mencakup kunjungan ke pameran dan instalasi teknis.

f. Pariwisata Untuk Berkonvensi (Convention Tourism)

Pariwisata untuk berkonvensi berhubungan dengan konferensi, simposium, sidang dan seminar internasional.

d. Peran Sektor Pariwisata

Menurut Hutabarat (1992) dalam Rahayu (2006), peran pariwisata saat ini antara lain sebagai berikut:

a. Peran Ekonomi

1) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah.

Peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintah berasal dari pembelanjaan dan biaya yang dikeluarkan wisatawan selama perjalanan dan persinggahannya seperti untuk hotel, makan dan minum, cendramata, angkutan dan sebagainya. Selain itu juga, mendorong peningkatan dan pertumbuhan di bidang pembangunan sektor lain. Salah satu ciri khas pariwisata, adalah sifatnya yang tergantung dan terkait dengan bidang pembangunan sektor lainnya. Dengan demikian, berkembangnya kepariwisataan akan mendorong peningkatan dan pertumbuhan bidang pembangunan lain.

2) Perkembangan pariwisata berpengaruh positif pada perluasan peluang dan kerja. Peluang usaha di bidang kerja tersebut lahir karena adanya permintaan wisatawan. Dengan demikian, kedatangan wisatawan ke suatu daerah akan membuka peluang bagi masyarakat tersebut untuk menjadi pengusaha hotel, wisma, homestay, restoran, warung, angkutan dan lain-lain. Peluang usaha tersebut akan memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk berkerja dan sekaligus dapat

menambah pendapatan untuk dapat menunjang kehidupan rumah tangganya.

b. Peran Sosial

1) Semakin luasnya lapangan kerja

Sarana dan prasarana seperti hotel, restoran dan perusahaan perjalanan adalah usaha-usaha yang “padat karya”. Untuk menjalankan jenis usaha yang tumbuh dibutuhkan tenaga kerja dan makin banyak wisatawan yang berkunjung, makin banyak pula lapangan kerja yang tercipta. Di Indonesia penyerapan tenaga kerja yang bersifat langsung dan menonjol adalah bidang perhotelan, biro perjalanan, pemandu wisata, instansi pariwisata pemerintah yang memerlukan tenaga terampil. Pariwisata juga menciptakan tenaga di bidang yang tidak langsung berhubungan, seperti bidang konstruksi dan jalan.

c. Peran Kebudayaan

1) Mendorong pelestarian budaya dan peninggalan sejarah.

Indonesia memiliki beraneka ragam adat istiadat, kesenian, peninggalan sejarah yang selain menjadi modal utama untuk mengembangkan pariwisata. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata akan mengupayakan agar modal utama tersebut tetap terpelihara, dilestarikan dan dikembangkan.

2) Mendorong terpeliharanya lingkungan hidup

Kekayaan dan keindahan alam seperti flora dan fauna, taman laut, lembah hijau, pantai dan sebagainya, merupakan daya tarik wisata. Daya tarik ini harus terus dipelihara dan dilestarikan karena hal ini merupakan modal bangsa untuk mengembangkan pariwisata.

3) Wisatawan selalu menikmati segala sesuatu yang khas dan asli.

Hal ini merangsang masyarakat untuk memelihara apa yang khas dan asli untuk diperlihatkan kepada wisatawan.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Daerah disektor Pariwisata

Mata rantai industri pariwisata yang berupa hotel atau penginapan, restoran atau jasa boga, usaha wisata (obyek wisata, souvenir, dan Hiburan), dan usaha perjalanan wisata (travel agent atau pemandu wisata) dapat menjadi sumber penerimaan daerah bagi Kota Semarang yang berupa pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, pajak dan bukan pajak (Badrudin, 2001).

Berikut ini beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan daerah di Kupaten Lombok Timur dari sektor pariwisata:

a. Jumlah Objek Wisata

Indonesia sebagai negara yang memiliki keindahan alam sertakeanekaragaman budaya yang mempunyai kesempatan untuk menjual keindahanalam dan atraksi budayanya kepada wisatawan baik wisatawan

mancanegara maupun nusantara yang akan menikmati keindahan alam dan budaya tersebut. Tentu saja kedatangan wisatawan tersebut akan mendatangkan penerimaan bagi daerah yang dikunjunginya. Bagi wisatawan mancanegara yang datang dari luar negeri, kedatangan mereka akan mendatangkan devisa bagi negara (Badrudin, 2001).

Begitu juga dengan Kabupaten Lombok Timur yang merupakan salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW). Kabupaten Lombok Timur memiliki potensi pariwisata yang cukup besar, khususnya wisata alam dan wisata budaya. Dengan demikian banyaknya jumlah objek wisata yang ada, maka diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Kabupaten Lombok Timur, baik melalui pajak daerah maupun retribusi daerah.

b. Jumlah Wisatawan

Menurut Soekadijo (2001) jumlah wisatawan adalah sejumlah orang yang mengadakan perjalanan dan pergi kesuatu tempat yang akan didatanginya tanpa menetap di tempat tersebut, atau hanya untuk sementara waktu tinggal ditempat yang didatanginya. Sedangkan Mereka yang dianggap sebagai wisatawan adalah orang yang melakukan kesenangan, karena alasan kesehatan dan sebagainya: orang yang melakukan perjalanan untuk pertemuan-pertemuan atau dalam kapasitasnya sebagai perwakilan (Foster, 1999).

Secara teoritis (apriori) dalam Ida Austriana, 2005 semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, maka semakin banyak pula

uang yang dibelanjakan di daerah tujuan wisata tersebut, paling sedikit untuk keperluan makan, minum dan penginapan selama tinggal di daerah tersebut.

Menurut Organisasi Wisata Dunia (WTO), menyebut jumlah wisatawan hasil dari total keseluruhan orang yang bukan penduduk asli yang datang untuk melakukan perjalanan pendek. Adapun menurut Krapf and Hunziker (1996), seorang pakar pariwisata meyakini bahwa jumlah wisatawan adalah munculnya serangkaian hubungan dari sebuah perjalanan temporal yang dijalin oleh sejumlah orang yang bukan penduduk asli dengan alasan untuk mencari kesenangan. Berdasarkan seluruh definisinya, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah wisatawan adalah total keseluruhan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara yang berkunjung atau datang kesuatu tempat yang bukan daerah tempat tinggalnya dengan tujuan untuk berlibur.

Berbagai macam kebutuhan wisatawan selama perjalanan wisatanya akan menimbulkan gejala konsumtif untuk produk-produk yang ada di daerah tujuan wisata. Dengan adanya kegiatan konsumtif baik dari wisatawan mancanegara maupun domestik, maka akan memperbesar pendapatan dari sektor pariwisata suatu daerah. Oleh karena itu, semakin tingginya arus kunjungan wisatawan keKabupaten Lombok Timur, maka pendapatan sektor pariwisata seluruh Kabupaten Lombok Timur juga akan semakin meningkat.

c. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu, yang ditunjukkan dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pendapatan perkapita yang tinggi cenderung mendorong naiknya tingkat konsumsi perkapita yang selanjutnya menimbulkan intensif bagi diubahnya struktur produksi (pada saat pendapatan meningkat, permintaan akan barang manufaktur dan jasa pasti akan meningkat lebih cepat dari pada permintaan akan produk-produk pertanian) (Todaro, 2000).

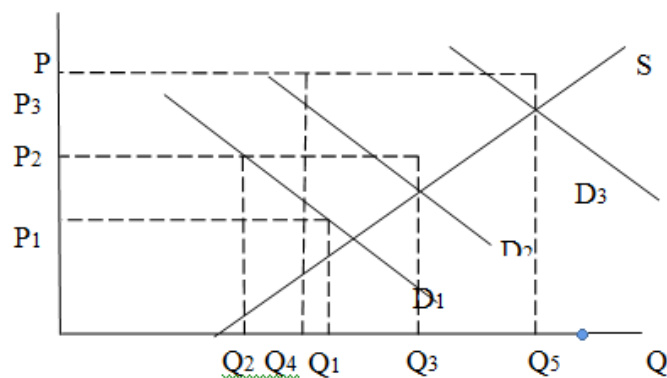
PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Pada umumnya orang-orang yang melakukan perjalanan wisata mempunyai tingkat sosial ekonomi yang tinggi. Mereka memiliki trend hidup dan waktu senggang serta pendapatan (*income*) yang relatif besar. Artinya kebutuhan hidup minimum mereka sudah terpenuhi. Mereka mempunyai cukup uang untuk membiayai perjalanan wisata.

Semakin besar tingkat pendapatan perkapita masyarakat maka semakin besar pula kemampuan masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata, yang pada akhirnya berpengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan daerah sektor pariwisata di Kabupaten Lombok Timur.

4. Permintaan Pariwisata

Pariwisata diPandang sebagai suatu jasa yang sangat disukai (*Preferred goods or services*), karena ia lebih banyak dilakukan ketika pendapatan meningkat. Di saat banyak kelurga yang memasuki kelompok pendapatan lebih tinggi, maka permintaan untuk berwisata meningkat lebih cepat dari pendapatan. Harrison (Lundberg, dkk 1997) membuat kurva permintaan individual veblen seperti yang terlihat pada gambar 2.1

Gambar 2.1
Kurva Permintaan Individual Veblen



Sumber: Lundberg, dkk 1997

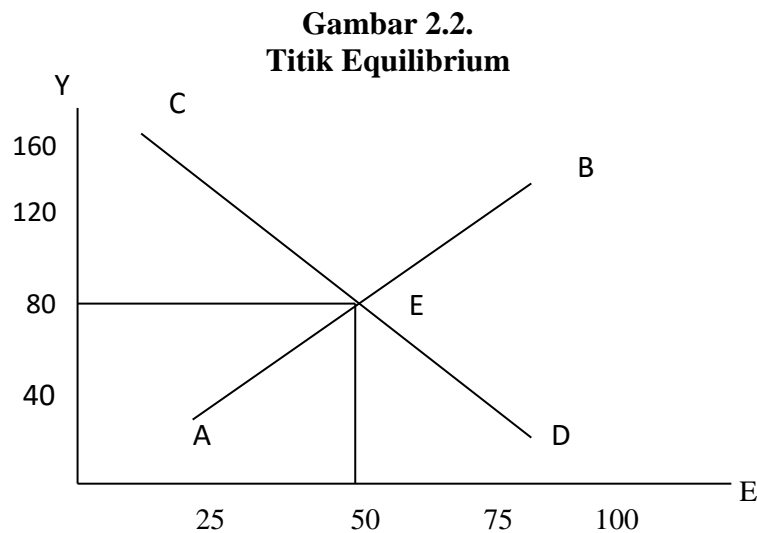
Jika harga P_1 ditetapkan, maka individual akan meminta sebesar Q_1 . Jika harga dinaikan menjadi P_2 menurut kurva permintaan D_1 , jumlah yang akan diminta akan menurun ke Q_2 . Hal ini tidak terjadi, padakurva Vablen karena individu memberi suatu arti penting baru pada produk itu. Dalam pengaruhnya, harga baru itu telah menambah nilai kesenangan kualitas pelayanan atau pengalaman yang ditawarkan. Kurva permintaan bukan bergeser ke bawah melainkan bergeser ke D_2 akibat pengaruh Vablen itu sehingga jumlah yang diminta adalah Q_3 pada harga P_2 , Jika harga terus dinaikan ke P_3 , maka menurut

kurva permintaan Vablen, jumlah yang diminta menjadi Q_5 , bukan suatu penurunan jumlah yang diminta ke Q_4 . Ini berlangsung sampai pada suatu titik dimana pendapatan tidak lagi mencukupi untuk memberi barang tersebut.

5. Penawaran Pariwisata

Pengertian penawaran dalam pariwisata meliputi semua macam poduk dan pelaanan/jasa yang dihasilkan oleh kelompok perusahaan industri pariwisata sebagai pemasok, yang ditawarkan baik kepada wisatawan yang datang secara langsung atau yang membeli melalui Agen Perjalanan (AP) atau Biro Perjalanan Wisata (BPW) sebagai perantara (Yoeti, 2008).

Ada pun harga yang digunakan kosumen (wisatawan) akan terbentuknya bila tingkat harga yang digunakan sama dengan jumlah kamar yang tersedia seperti ditunjukkan oleh titik E (equilibrium), yaitu titik perpotongan kurva permintaan AB dan penawaran CD, seperti tampak pada Gambar 2.2.



Sumber: Yoeti, 2008

Keseimbangan penawaran dan permintaan dikatakan stesioner dalam arti bahwa sekali harga keseimbangan tercapai, biasanya cenderung untuk tetap dan

tidak berubah selama permintaan dan penawaran tidak berubah. Dengan perkataan lain, jika tidak ada pergeseran penawaran maupun permintaan, tidak ada yang mempengaruhi harga akan mengalami perubahan.

Menurut Spillane (1987), penawaran pariwisata dapat dibagi menjadi:

1. Proses Produksi industri pariwisata

Kemajuan pengembangan pariwisata sebagai industri dtunjang oleh bermacam-macam usaha yang perlu, antara lain:

- a. Promosi untuk memperkenalkan obyek wisata
- b. Transportasi yang lancar
- c. Kemudian keimigrasian atau birokrasi
- d. Akomodasi yang menjamin penginapan yang nyaman.
- e. Pemandu wisata yang cakap
- f. Penawaran barang dan jasa dengan mutu terjamin dan tarif harga yang wajar.
- g. Pengisian waktu dengan atraksi-atraksi yang menarik.
- h. Kondisi kebersihan dan kesehatan lingkungan hidup.

2. Penyediaan lapangan kerja

Perkembangan pariwisata berpengaruh positif pada perluasan kesempatan kerja. Berkembangnya suatu daerah pariwisata tidak hanya membuka lapangan kerja bagi oenduduk setempat, tetapi juga menarik pendatang-pendatang baru dari luar daerah justru karena tersedia lapangan kerja tadi.

3. Penyediaan Infrastruktur

Industri pariwisata juga memerlukan prasarana ekonomi seperti jalan raya, jembatan, terminal, pelabuhan lapangan udara. Jelas bahwa hasil-hasil pembangunan fisik bisa ikut mendukung pengembangan pariwisata.

4. Penawaran jasa keungan

Tata cara hidup yang tradisional dari suatu masyarakat juga merupakan salah satu sumber yang sangat penting untuk ditawarkan kepada para wisatawan. Bagaimana kebiasaam hidupnya, adat istiadatnya, semuanya merupakan daya tarik bagi wisatawan untuk datang ke suatu daerah. Hal ini dapat dijelaskan sebagai event yang dapat dijual oleh daerah setempat (Yoeti, 2008).

6. Dampak Pariwisata

Pengembangan pariwisata pada dasarnya dapat membawa berbagai manfaat bagi masyarakat di daerah. Seperti diungkapkan oleh Soekadijo (2001), manfaat pariwisata bagi masyarakat lokal, antara lain: pariwisata memungkinkan adanya kontak antara orang-orang dari bagian-bagian dunia yang paling jauh, dengan berbagai bahasa, ras, kepercayaan, paham, politik, dan tingkat perekonomian. Pariwisata dapat memberikan tempat bagi pengenalan kebudayaan, menciptakan kesempatan kerja sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Sarana-sarana pariwisata seperti hotel dan perusahaan perjalanan merupakan usaha-usaha yang padat karya, yang membutuhkan jauh lebih banyak tenaga kerja dibandingkan dengan usaha lain. Manfaat yang lain adalah pariwisata menyumbang kepada neraca pembayaran,

karena wisatawan membelanjakan uang yang diterima di negara yang dikunjunginya. Maka dengan sendirinya penerimaan dari wisatawan mancanegara itu merupakan faktor yang penting agar neraca pembayaran menguntungkan yaitu pemasukan lebih besar dari pengeluaran.

Dampak positif yang langsung diperoleh pemerintah daerah atas pariwisata tersebut yakni berupa pajak daerah maupun bukan pajak lainnya. Sektor pariwisata memberikan kontribusi kepada daerah melalui pajak daerah, laba Badan Usaha Milik Daerah, serta pendapatan lain-lain yang sah berupa pemberian hak atas tanah pemerintah. Dari pajak daerah sendiri, sektor pariwisata memberikan kontribusi berupa pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak minuman beralkohol serta pajak pemanfaatan air bawah tanah.

Menurut Spillane (1987) belanja wisatawan di daerah tujuan wisatanya juga akan meningkatkan pendapatan dan pemerataan pada masyarakat setempat secara langsung maupun tidak langsung melalui dampak berganda (*multiplier effect*). Dimana di daerah pariwisata dapat menambah pendapatannya dengan menjual barang dan jasa, seperti restoran, hotel, pramuwisata dan barang-barang souvenir. Dengan demikian, pariwisata harus dijadikan alternatif untuk mendatangkan keuntungan bagi daerah tersebut.

Dampak positif lain dari pariwisata adalah Dampak pariwisata diukur dalam dua tahap, yaitu dampak langsung dan tidak langsung terhadap perekonomian. Dampak langsung antara lain diukur melalui tingkat belanja devisa pariwisata dan dampaknya terhadap lapangan kerja. Sementara dampak

tidak langsung meliputi pengukuran efek yang ditimbulkan terhadap pendapatan nasional (pertumbuhan ekonomi). Dalam jangka panjang, efek pariwisata terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat diidentifikasi melalui beberapa saluran yang berbeda, yaitu sebagai berikut :

1. Pariwisata adalah penghasil devisa yang cukup besar, yang tersedia untuk pembayaran barang-barang atau bahan baku dasar yang diimpor yang digunakan dalam proses produksi.
2. Pariwisata memainkan peranan penting dalam mendorong investasi pada infrastruktur barudan persaingan antar perusahaan lokal dengan perusahaan di negara turis lainnya.
3. Pariwisata menstimulasi industri-industri lainnya, baik secara langsung, tidak langsung maupun efek stimulasi.
4. Pariwisata memberikan kontribusi untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan.
5. Pariwisata bisa menimbulkan eksploitasi yang positif dari skala ekonomis (*economies of scale*) perusahaan-perusahaan nasional
6. Pariwisata adalah faktor penting untuk difusi pengetahuan teknis, stimulasi riset dan pengembangan, dan akumulasi modal sumber daya manusia.

Selain adanya dampak positif yang ditimbulkan dari pariwisata tentu saja ada pula dampak negatif yang ditimbulkannya antara lain:

1. Terjadinya *leakages* impor dan ekspor, penurunan pendapatan pekerja dan penerimaanbisnis lokal. *Leakage* impor meliputi pengeluaran impor untuk peralatan, makanan dan minuman, serta produk-produk lain yang

tidak bisa dipenuhi oleh *host country*, yang sesuai dengan standar pariwisata internasional. *Leakage* ekspor adalah aliran keluar keuntungan yang diraih oleh investor asing yang mendanai *resorts* dan hotel. Para investor asing mentransfer penerimaan atau keuntungan pariwisata keluar dari *host country*.

2. Adanya batasan manfaat bagi masyarakat daerah yang terjadi karena pelayanan kepada turis yang serba inklusif. Keberadaan paket wisata yang “serba inklusif” dalam industri pariwisata dimana segala sesuatu tersedia, termasuk semua pengeluaran didefinisikan menurut ukuran turis internasional dan memberikan lebih sedikit peluang bagi masyarakat daerah untuk memperoleh keuntungan dari pariwisata.

5. Dampak Kegiatan Pariwisata Terhadap Ekonomi Makro

Dampak utama kegiatan pariwisata dari segi ekonomi terhadap level nasional (makro) dapat ditinjau dari dua segi (Wahab, 1989: 82) yaitu:

- a. Akibat langsung yang ditimbulkan oleh pariwisata terhadap bidang ekonomi meliputi:
 - 1) Akibatnya terhadap neraca pembayaran (pariwisata dan neraca pembayaran).

Kegiatan pariwisata adalah suatu lalu lintas dua arah. Setiap negara harus menjadi negara penerima wisatawan, meskipun dengan tarif yang beraneka tingkat.

- 2) Akibatnya untuk kesempatan kerja (pariwisata dan kesempatan kerja).
Banyak kegiatan yang ditimbulkan oleh pariwisata pada suatu negara, yaitu akan mendatangkan lebih banyak kesempatan kerja dari daerah sektor ekonomi lainnya. Alasannya karena industri pariwisata umumnya berorientasi pada penjualan jasa.
- 3) Akibatnya dalam mendistribusikan pendapatan lagi.
Pariwisata mendatangkan dampak langsung yang lain kepada daerah-daerah terpencil yang sedang berkembang dan belum dikembangkan asal saja daerah-daerah itu memiliki daya tarik wisata berarti. Pariwisata menemukan cara pemberian kompensasi ekonomis yang berbeda dengan bidang lainnya. Pariwisata dapat mendorong ekspansi yang berarti dari aktivitas ekonomi lokal maupun regional dengan cara mengarahkan daya beli kelompok industriawan dan pedagang menuju daerah-daerah yang secara ekonomis masih lemah.
- 4) Akibat tidak langsung yang ditimbulkan oleh kegiatan pariwisata, mencakup:
 - a) Hasil ganda (*multiplier*)
Pengeluaran wisatawan mengakibatkan pengaruh ganda (*multiplier effect*) pada ekonomi negara penerima wisatawan atau suatu daerah pembelanjaan wisata di negara itu.

b) Hasilnya dalam memasarkan produk-produk tertentu.

Pariwisata adalah daya konsumtif yang dinamis yang mendorong konsumsi produk-produk pertanian, minuman, tembakau dan lain-lain.

c) Hasilnya untuk sektor pariwisata (pajak).

Pariwisata seperti halnya kegiatan ekonomi yang lain, mendatangkan pendapatan bagi pemerintahan dalam bentuk pajak langsung dan tidak langsung.

d) Hasil “tiruan” yang mempengaruhi masyarakat.

C. Hasil Penelitian Terdahulu

Di dalam hal ini penelitian terdahulu berguna sebagai rujukan atau referensi, bahkan sebagai bahan untuk membantu penulis dalam proses penyusunan penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan untuk membantu proses penelitian ini adalah :

1. Menurut penelitian yang diteliti oleh Susiana (2003) dengan judul Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Daerah Dari Sektor Pariwisata Kota Surakarta (1985-2000). Dalam penelitian terdahulu oleh Susiana (2003), mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Kota Surakarta dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel-variabel independen terhadap penerimaan daerah dari sektor pariwisata sebagai variabel dependennya. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda

dengan penerimaan daerah dari sektor pariwisata sebagai variabel dependen dan lima variabel sebagai variabel independen yaitu jumlah obyek dan atraksi wisata, jumlah kamar hotel berbintang dan melati terhuni, jumlah wartel dan pos-pos telepon, jumlah armada biro perjalanan wisata dan jumlah kunjungan wisatawan di kota Surakarta. Dari hasil uji signifikansi diperoleh bahwa secara keseluruhan semua variabel independen berpengaruh signifikan dan dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 76,5 persen.

2. Penelitian yang dilakukan Juliafitri Dj. Gafur (2005) tentang pengaruh obyek wisata, hotel, hiburan dan restoran terhadap PAD (pajak dan redistribusi) di daerah Kota Bitung menunjukkan bahwa hubungan variabel X dan Y berbentuk linier yang arahnya positif tetapi masih sangat minim dan perlu untuk dilakukan upaya agar tercapai hasil yang maksimal.
3. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lia Andriani Windriyaningrum (2013) dengan judul penelitian Pengaruh Tingkat Hunian Hotel, Jumlah Wisatawan dan Jumlah Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Sektor Pariwisata Di Kabupaten Kudus Tahun 1981-2011 Dalam penelitian terdahulu oleh Lia Andriani, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh tingkat hunian hotel, jumlah wisatawan dan jumlah obyek wisata terhadap pendapatan sektor pariwisata. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian menyatakan bahwa ketiga

variabel yaitu tingkat hunian hotel, jumlah wisatawan dan jumlah obyek wisata berpengaruh signifikan terhadap pendapatan sektor pariwisata di Kabupaten Kudus.

4. Pada penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Gede Sedana Putra tahun 2011 menganalisis pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap penerimaan retribusi objek wisata, pendapatan asli daerah dan anggaran pembangunan kabupaten Gianyar tahun 1991-2010 dengan menggunakan regresi linier untuk menganalisis apakah anggaran pembangunan daerah dipengaruhi oleh jumlah wisatawan yang berkunjung ke objek wisata, retribusi objek wisata dan pendapatan asli daerah (PAD).

Variabel yang digunakan: $Y = b_4X_1 + b_5X_2 + b_6X_3 + e_3$

Hasil penelitian yang didapat adalah secara keseluruhan variabel objek wisata dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran pembangunan daerah, hanya variabel jumlah kunjungan wisatawan yang tidak berpengaruh signifikan terhadap anggaran pembangunan.

5. Pada penelitian yang dilakukan oleh Yaumul Ramdani (2015) dengan judul penelitian Analisis Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Pajak, Retribusi dan Investasi Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam penelitian terdahulu oleh Yaumul Ramdani, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, pajak, retribusi dan investasi terhadap penerimaan

pendapatan asli daerah di DIY. Alat analisis yang digunakan yaitu Data Panel. Hasil penelitian menyatakan bahwa keempat variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di DIY.

6. Pada penelitian yang dilakukan Purwanti dan Dewi (2014) yang berjudul “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006-2013”. Kabupaten Mojokerto memiliki potensi di bidang pariwisata alam yang memanfaatkan sumber daya hutan yang dimiliki dan pariwisata budaya. Sektor pariwisata di kabupaten Mojokerto semakin berkembang banyaknya tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Namun jumlah kunjungan wisatawan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto karena menurunnya jumlah kunjungan wisatawan di tahun 2011. Tahun 2011 jumlah kunjungan wisatawan paling sedikit diantara tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Suartini dan Utama (2013) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gianyar” kabupaten Gianyar memiliki kebudayaan yang beraneka ragam yang meliputi adat istiadat maupun kesenian. Dalam bidang seni memiliki daya tarik tersendiri karena bisa dijadikan identitas daerah sehingga diketahui oleh dunia. Berkembangnya industri pariwisata di Kabupaten Gianjar telah mampu menggerakkan sektor-sektor yang mempunyai keterkaitan langsung dengan industri pariwisata. Penelitian ini menunjukkan

adanya pengaruh yang signifikan dari jumlah kunjungan wisatawan, pajak hiburan, pajak hotel dan restoran. Jumlah kunjungan wisatawan, pajak hiburan, pajak hotel dan restoran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Cristimulia Purnama Trimurti (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Sektor Pariwisata Dalam Perekonomian Provinsi Bali” Kunjungan wisatawan mancanegara kurang memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, kurang memberikan dukung terhadap tenaga kerja, tidak memberikan dukungan terhadap inflasi dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tidak memberikan dukungan pada penurunan angka kemiskinan di Bali.
9. Penelitian yang dilakukan oleh Arif Wahyu Isnaini (2014) dengan penelitian yang berjudul “ Studi Potensi Ekonomi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung” Berdasarkan dari estimasi regresi maka diketahui bahwa besarnya nilai R^2 yang diperoleh adalah sebesar 0,857 atau 85,7% yang artinya bahwa variasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung dapat dijelaskan oleh variasi keempat variabel bebas. Sedangkan sisanya sebesar 14,3 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model. Pada uji F dengan tingkat signifikansi F dibawah 0,000 maka variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung. Sedangkan menurut hasil output regresi dari t-statistik dri keempat variabel menyatakan semua signifikan, sedangkan variabel

pendapatan per kapita tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Dan variabel yang paling berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah adalah variabel jumlah obyek wisata dengan nilai t-hitung sebesar 4,407 dan tingkat signifikansi 0,001.

10. Penelitian yang dilakukan Femy Nadia Rahma, Herniwati Retno Handayani (2013) dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Objek Wisata Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Penerimaan Sektor Pariwisata Di Kabupaten Kudus” Variabel Jumlah kunjungan wisatawan (X_1), jumlah objek wisata (X_2), Pendapatan Perkapita (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan sektor pariwisata di Kabupaten Kudus.

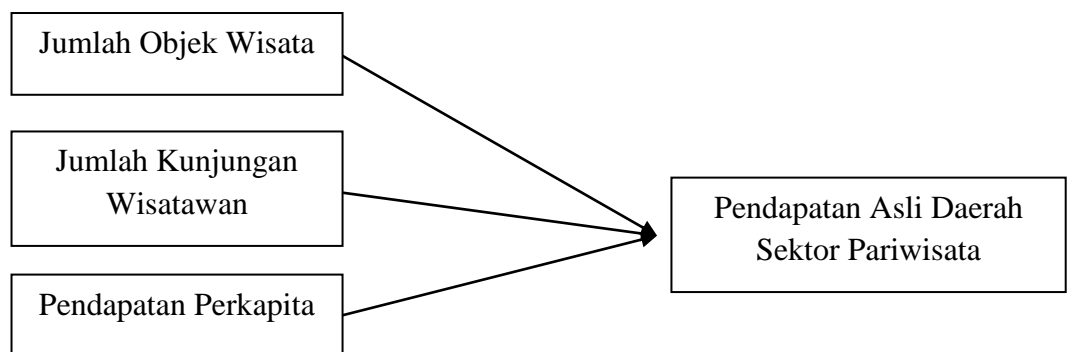
D. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah antara lain :

- 1) Variabel Jumlah Objek Wisata diduga memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah sektor Pariwisata di Kabupaten Lombok Timur.
- 2) Variabel Jumlah Kunjungan Wisatawan diduga memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah sektor Pariwisata di Kabupaten Lombok Timur.
- 3) Variabel Pendapatan Perkapita diduga memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah sektor Pariwisata di Kabupaten Lombok Timur.

E. Model Penelitian

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian “Determinan yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah sektor Pariwisata di Kabupaten Lombok Timur tahun 2007-2014” adalah antara lain variabel objek wisata, variabel jumlah kunjungan wisatawan, variabel pendapatan perkapita, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 2.3.
Kerangka Pemikiran